

**DARI PUSAT KEKUASAAN KE SENYAP:
BERAKHIRNYA KEPATIHAN KASUNANAN SURAKARTA
1945-1946 M**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Humaniora (S. Hum)

Oleh:

Luluk Kholifatun Nikmah
18101020054

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Luluk Kholifatun Nikmah

NIM : 18101020054

Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul Skripsi : Dari Pusat Kekuasaan ke Senyap: Berakhirnya Kepatihan
Kasunanan Surakarta 1945-1946 M

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Luluk Kholifatun Nikmah
18101020054

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Setelah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul **Dari Pusat Kekuasaan ke Senyap: Berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta 1945-1946** yang ditulis oleh:

Nama	: Luluk Kholifatun Nikmah
NIM	: 18101020054
Program Studi	: Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menempuh sidang munaqosyah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'ailakum warohmatullahi wabarokatuh.

Yogyakarta, 3 Agustus 2025 M
9 Shafar 1447 H

Dosen Pembimbing



Riswinarno, SS, MM
NIP. 19700129 199903 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1544/Un.02/DA/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Dari Pusat Kekuasaan ke Senyap: Berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta 1945-1946 M

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LULUK KHOLIFATUN NIKMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18101020054
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Riswinarno, S.S., M.M.
SIGNED

Valid ID: 68a8259b53107



Penguji I
Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a81baab4dbb



Penguji II
Abdul Aziz, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a81eeb82600



Yogyakarta, 06 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68abfe575f3e9

MOTTO

“Tuhan tidak akan memberikan kamu ujian melebihi kapasitasmu”

Q.S. Al-Baqarah ayat 286



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang menyelesaikan tanggung jawabmu dan memilih untuk tidak menyerah dalam proses ini.
2. Kedua orang tuaku dan kakakku serta keluarga yang selalu memberi semangat dan dukungan serta sabar menanti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater saya, Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DARI PUSAT KEKUASAAN KE SENYAP: BERAKHIRNYA KEPATIHAN KASUNANAN SURAKARTA 1945-1946 M

ABSTRAK

Kepatihan Kasunanan Surakarta adalah lembaga berperan sebagai bidang administrasi pemerintahan dan patih sebagai kepala serta wakil dari susuhunan. Kepatihan Kasunanan Surakarta tetap ada dan berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia. Surakarta menjadi daerah istimewa, tetapi, hal tersebut ditentang oleh sejumlah besar laskar dan kelompok perjuangan sehingga menimbulkan gerakan anti swapraja dan berbagai peristiwa di Surakarta. Pada tahun 1946, Daerah Istimewa Surakarta dibekukan dan mengakhiri kekuasaan tradisional, termasuk berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta. Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana sejarah Kepatihan Kasunanan Surakarta, (2) bagaimana Kepatihan Kasunanan Surakarta setelah kemerdekaan, dan (3) mengapa Kepatihan Kasunanan Surakarta berakhir. Penelitian ini termasuk ke dalam *library research* serta menggunakan pendekatan politik dan sosiologi. Adapun teori yang digunakan adalah teori konflik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Kepatihan Kasunanan Surakarta terbentuk setelah Perjanjian Giyanti. Lembaga Kepatihan Kasunanan Surakarta menjadi pusat administrasi pemerintahan kerajaan. Patih sebagai pemimpin tertinggi di Kepatihan dan dibantu oleh para Bupati *Nayaka* dan *Pangreh Praja* dan terus ke bawah. Setelah masuknya birokrasi kolonial, patih bukan hanya sebagai wakil dari sunan, tetapi juga termasuk bagian dari pemerintahan kolonial. Kepatihan Kasunanan Surakarta mencapai masa keemasan dengan patih yang tersohor yaitu Patih Sasradiningrat IV. Memasuki tahun 1945, setelah diumumkannya kemerdekaan Indonesia, Kasunanan bergabung dengan Republik Indonesia dan Surakarta menjadi daerah istimewa. Kepatihan sebagai pusat administrasi keraton tetap diakui, tetapi mengalami penurunan fungsi dengan dibentuknya lembaga resmi pemerintah Indonesia. Pada rentang waktu 1945-1946 terjadi tuntutan penghapusan pemerintahan swapraja yang mengakibatkan adanya peristiwa penerobosan dan penculikan di Kepatihan. akibat dari konflik yang terjadi, pemerintah pusat mengeluarkan keadaan bahaya di Surakarta. Pada tanggal 15 Juli 1946, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 16/SD/1946 tentang pembekuan Daerah Istimewa Surakarta yang mengakibatkan hilangnya kekuasaan swapraja di Surakarta serta akhir dari Kepatihan kasunanan Surakarta.

Kata Kunci: Kepatihan, Surakarta, Anti Swapraja

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah swt. yang telah memberikan *rahmat* dan *hidayah*-nya kepada seluruh umat manusia. Salawat senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad saw. yang selalu dinantikan *syafaat*-nya di hari akhir nanti.

Skripsi dengan judul “Berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta” dalam penyusunan dan penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moral, material, dan spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Riswinarno, S. S., M. M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberi ilmu selama menempuh perkuliahan di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kedua orang tua, Bapak Kasdi dan Ibu Ginem serta kedua kakakku Muhammad Zainal Abidin dan Ratna yang selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti. Tak lupa keponakan kecilku Luthfiana Az-Zahra Putri dan Adzkiya Nasywa Humaira yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi untuk selesai.
8. Kepada K.R.A.T Drs. Supardjo Dwidjo Hadinagara, M. Hum, Dra. Endang Tri Winarni, M. Hum., dan Ibu Mar yang telah membimbing dan membantu dalam mencari sumber data di Perpustakaan Sasana Pustaka.
9. Teman-temanku Eva, Zaid, Afrian, dan teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini, Fitria, Sari, Likha, Sofi, Marshel, dan Una yang telah kebersamai dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Atas semua dukungan dari berbagai pihak, peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan dengan lebih baik. Selain itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang berguna untuk perbaikan penulisan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bacaan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sejarah Islam.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II SEJARAH KEPATIHAN KASUNANAN SURAKARTA.....	23
A. Periode Awal Kepatihan Kasunanan Surakarta.....	23
1. Sejarah Pembentukan Kepatihan Kasunanan Surakarta	23
2. Sistem Pemerintahan Kepatihan Kasunanan Pada Masa Awal	25
B. Periode Keemasan Kepatihan Kasunanan Surakarta.....	31
BAB III PERUBAHAN KEPATIHAN KASUNANAN SURAKARTA SETELAH KEMERDEKAAN INDONESIA.....	36
A. Perubahan Politik dan Status Kasunanan Surakarta Setelah Tahun 1945..	36
B. Perubahan Fungsi Kepatihan Kasunanan Surakarta dalam Sistem Pemerintahan Kasunanan Surakarta pasca terbentuknya DIS	41
BAB IV KERUNTUHAN KEPATIHAN KASUNANAN SURAKARTA	44
A. Faktor-faktor Keruntuhan Keptihan Kasunanan Surakarta.....	44
1. Faktor Internal	44

2. Faktor Eksternal.....	46
B. Pembubaran Kepatihan Kasunanan Suraakarta	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP	82



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Undang-undang No.1 Tahun 1945
- Lampiran 2. Undang-Undang No.16 Tahun 1946
- Lampiran 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950
- Lampiran 4. SK Pendirian Konservatori Karawitan Indonesia
- Lampiran 5. Gambar Sampul Serat Tetepan Papatih Dalem
- Lampiran 6. Foto Patih Sasradinngrat IV dan Para Bupati Nayaka
- Lampiran 7. Foto Patih Sasradiningrat IV
- Lampiran 8. Gambar Patih Jayanagara
- Lampiran 9. Gambar Komplek Keptihan Surakarta
- Lampiran 10. Gambar Pendopo Keptihan Surakarta
- Lampiran 11. Gambar Halaman dan Rumah Patih
- Lampiran 12. Interior Bangsal Keptihan Surakarta
- Lampiran 13. Gambar Regol Keptihan
- Lampiran 14. Surat Izin Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surakarta merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menjadi kota yang penuh dengan peristiwa sejarah. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Surakarta termasuk ke dalam wilayah *Vorstenlanden*. *Vorstenlanden* adalah daerah swapraja yang memiliki kekuasaan atau pemerintahan secara mandiri di daerahnya sendiri. Kekuasaan di *Vorstenlanden* terdiri atas kerajaan-kerajaan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1586 di Kotagede, Yogyakarta.¹ Kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi empat kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta (1755), Kasultanan Yogyakarta (1755), Praja Mangkunegaran (1757), dan Kadipaten Pakualaman (1813).²

Surakarta terdiri atas dua kerajaan yang berkuasa, yaitu Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Pada struktur pemerintahan tradisional, raja memiliki kedudukan atau pemegang kuasa paling tinggi. Seorang raja berperan sebagai seorang kepala pemerintahan, panglima perang, dan pemimpin agama.³ Adapun dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu

¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 214.

²A. Daliman, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 286.

³Dwi Ratna Nurhajarini, Dkk., *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta* (Jakarta: CV Ilham Bangun Karya, 1999), hlm. 28-32.

oleh beberapa lembaga pemerintahan. Lembaga tersebut terdiri atas *Reh Kepatihan*, *Reh Kadipaten Anom*, dan *Reh Pengulon*.⁴

Reh Kepatihan atau lembaga Kepatihan Kasunanan Surakarta berperan sebagai pengelola administrasi keraton dan pemegang kuasa kedua setelah raja. Struktur birokrasi di Kepatihan Kasunanan Surakarta terdapat Patih yang merupakan pemimpin dan berfungsi sebagai wakil raja dalam bidang pemerintahan. Adapun dalam pelaksanaannya, lembaga Kepatihan dibantu oleh para bupati yang dibagi menjadi Bupati *Nayaka* dan *Pangreh Praja*. Bupati *Nayaka* berjumlah delapan orang yang terbagi dalam Bupati *Nayaka Lebet* dan Bupati *Nayaka Jawi*. Bupati *Nayaka Lebet* bertugas dalam urusan keraton, sedangkan Bupati *Nayaka Jawi* bertugas menjaga keamanan dan ketentraman *kawula dalaem*⁵ di wilayah *Nagara Agung*. Bupati *Pangreh Praja* bertugas sebagai penguasa di tingkat kabupaten untuk seluruh wilayah di Kasunanan Surakarta.⁶

Kepatihan Kasunanan Surakarta berkedudukan di wilayah pusat kerajaan (*Kuthagara*). Sejak berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta pada 20 Februari 1745 setelah berpindah dari Keraton Kartasura, lokasi pusat kedudukan Kepatihan sempat berpindah-pindah. Kepatihan Kasunanan Surakarta berkedudukan pertama di Dalem Sindurejan dan berpindah ke Dalem

⁴Muhammad Anggie Farizqi Prasadana dan Hendri Gunawan, “Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Kasunanan Surakarta”, *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm.191-193.

⁵*Kawulo Dalem* merupakan kelompok masyarakat biasa atau rakyat kerajaan.

⁶Muhammad Anggie Farizqi Prasadana dan Hendri Gunawan, “Keruntuhan Birokrasi Tradisional...”, hlm. 192., lihat juga Belda Ranika Rosiana, “Terbentuknya Birokrasi Modern di Surakarta Tahun 1945-1950”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013, hlm. 34-35.

Jayanegaran. Pada masa pemerintahan Paku Buwono X, lembaga Kepatihan berkedudukan dan menetap di Dalem Kepatihan yang berlokasi di sebelah utara Pasar Gedhe.⁷

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah *Vorstenlanden* diberikan otonomi sendiri. Hal tersebut berdasarkan pada UU nomor 1 tahun 1945 yang berisi tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah (KND). Pada pasal 1 disebutkan bahwa wilayah Surakarta dan Yogyakarta tidak termasuk ke dalam wilayah dalam pemerintahan KND. Undang-undang tersebut dikeluarkan oleh pemerintahan tanggal 23 November 1945 serta ditanda tangani oleh Presiden Sukarno dan Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo.⁸

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegoro VIII menyampaikan telegram ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, tidak berlangsung lama diikuti dengan maklumat Paku Buwono XII. Maklumat tersebut berisi dukungan untuk berdiri di belakang Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 1945.⁹ Pada tanggal 6 September 1945, Presiden Sukarno memberikan Piagam Kedudukan sebagai respon atas maklumat yang disampaikan Paku Buwono

⁷Sekarang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Kepatihan Wetan dan Kulon, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

⁸Lihat UU No. 1 tahun 1945 tentang peraturan kedudukan Komite Nasional Daerah (KND).

⁹Imam Samroni, dkk., *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis, dan Yudiris* (Yogyakarta: Pura Pustaka, 2010), hlm. 295-296.

XII.¹⁰ Piagam tersebut menandakan pembentukan pemerintahan istimewa di Surakarta kepada Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran.

Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahan Kasunanan Surakarta. Setelah menjadi daerah istimewa, maka pemerintahan di Surakarta dipegang oleh swapraja, yakni Paku Buwono XII menjadi ketua dan Mangkunegara VIII menjadi wakilnya. Akan tetapi, Kepatihan Kasunanan Surakarta yang memiliki peran sebagai pemegang administrasi dan wakil raja tetap berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1946. Hal tersebut menimbulkan prasangka buruk di kalangan masyarakat dan kelompok perjuangan. Berbeda dengan Kesultanan Yogyakarta yang menghilangkan jabatan patih pada masa kedudukan Jepang. Sultan Hamengku Buwono IX mengambil keputusan tersebut bertujuan agar kekuasaan atas Kesultanan Yogyakarta dapat digenggamnya penuh dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.¹¹

Pembentukan daerah istimewa bagi Surakarta menimbulkan berbagai respon di kalangan masyarakat. Setelah kemerdekaan Indonesia, Surakarta merupakan daerah berkumpulnya berbagai kelompok politik, khususnya kekuatan oposisi setelah berpindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta 1946. Penolakan terhadap terbentuknya Daerah Istimewa

¹⁰Soedarisme Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1984), hlm. 251-252., yang dikutip oleh Ni'matul Huda, "Pengakuan Kembali Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam Perspektif Historis dan Yudiris", dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3 Vol. 20 Juli 2013, hlm. 404.

¹¹"Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta", *Kratonjogja.id.*, 02 April 2018. <https://www.kratonjogja.id/ragam/8-pepatih-dalem-kesultanan-yogyakarta/>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 12:13 WIB.

Surakarta atau anti swapraja muncul dari berbagai kalangan, baik masyarakat umum, laskar perjuangan, maupun internal keraton. Kelompok anti swapraja melakukan penculikan terhadap jajaran pemerintahan keraton.¹² Antara tahun 1945-1946 terjadi penculikan terhadap patih dan pegawai kepatihan sehingga menimbulkan beberapa kali penggantian jabatan di Kepatihan Surakarta. Keadaan yang semakin memanas di Surakarta membuat pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang penetapan keadaan bahaya di daerah Surakarta, Jawa-Madura, dan seluruh Indonesia.¹³

Daerah Istimewa Surakarta dibekukan pada bulan Juli 1946 dan pemerintahan diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Pembekuan tersebut dilakukan setelah terbit surat penetapan Peraturan Presiden No. 16/SD/1946. Penetapan peraturan ini mengakibatkan kekuasaan tradisional dibekukan dan tidak dapat menjalankan roda pemerintahan di Surakarta, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran. Keadaan tersebut diperjelas dengan dibentuknya Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya mencakup wilayah Daerah Istimewa Surakarta (Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran) pada tahun 1950.¹⁴

Melihat peristiwa yang terjadi di atas dengan keadaan Surakarta, khususnya Kepatihan Kasunanan Surakarta pada saat ini, membuat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kepatihan sebagai bagian dari Kasunanan Surakarta yang telah

¹²Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di Simping Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta* (Wonogiri: BINA CITRA PUSTAKA, 2004), hlm. 157-160.

¹³Lihat UU No. 16 tahun 1946 tentang pernyataan bahaya di seluruh Indonesia. Surakarta ditetapkan ke dalam “keadaan darurat” pada tanggal 6 Juni 1946.

¹⁴Lihat UU No. 10 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

memerintah selama berabad-abad mengalami perubahan khususnya setelah masa kemerdekaan Indonesia. Perubahan baik dari politik maupun sistem pemerintahan yang terjadi menimbulkan berbagai peristiwa hingga menyebabkan tumbanganya swapraja di Surakarta dan berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta. Meskipun demikian, Kepatihan Kasunanan Surakarta masih bertahan di tengah masa revolusi hingga tahun 1946. Berdasarkan alasan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dari Pusat Kekuasaan ke Senyap: Berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta 1945-1946 M”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada peristiwa yang terjadi di Kepatihan Kasunanan Surakarta, khususnya pada masa-masa akhir, yakni tahun 1945-1946. Secara temporal, peneliti memberikan batasan pada penelitian ini dimulai dari tahun 1945 sampai 1946. Pada tahun 1945, merupakan titik awal perubahan Kepatihan setelah diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia dan bergabungnya Kasunanan Surakarta menjadi bagian dari Indonesia. Batas tahun 1946 diambil karena secara resmi pemerintahan di wilayah Surakarta dihentikan dan dibekukan. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden pada tanggal 15 Juli No. 16/SD/1946 yang menetapkan bahwa sistem pemerintahan di Surakarta diambil alih oleh pemerintahan pusat untuk sementara waktu dan dijadikan sebagai daerah karesidenan. Dengan peraturan tersebut, maka kekuasaan tradisional

Kasunanan dan Mangkunegaran dibekukan. Hal ini berarti secara *de facto* dan *de jure* pemerintahan swapraja di Surakarta runtuh.¹⁵

Batas spasial dalam penelitian ini adalah Daerah Istimewa Surakarta, khususnya pada kota Surakarta. Adapun secara rinci permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sejarah Kepatihan Kasunanan Surakarta?
2. Bagaimana Kepatihan Kasunanan Surakarta setelah kemerdekaan Indonesia?
3. Mengapa Kepatihan Kasunanan Surakarta berakhir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di Kepatihan Surakarta, khususnya menjelang akhir hingga diberhentikan. Di dalam pembahasan dijelaskan peristiwa-peristiwa dalam rentang yang cukup singkat, yakni dari tahun 1945-1946. Selain itu, di dalam penelitian juga dijelaskan sejarah Kepatihan Kasunanan Surakarta.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Dapat dijadikan salah satu sumber dalam memahami sejarah yang terjadi di Surakarta khususnya mengenai peristiwa berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta.
2. Memberikan sumbangan penelitian tentang perpolitikan tradisional dalam masa revolusi di Indonesia.

¹⁵Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan....*, hlm. 165-166.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini sudah banyak peneliti yang mengkaji tentang Surakarta atau Solo, baik itu sejarah kota tersebut maupun dua Kerajaan Mataram Islam. Akan tetapi, belum banyak yang mengkaji secara khusus tentang Kepatihan Kasunanan Surakarta setelah masa kemerdekaan Indonesia. Pergolakan politik yang terjadi pada masa revolusi Indonesia mengakibatkan perubahan pada segala bidang tatanan di masyarakat, tidak terkecuali Kepatihan Surakarta. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain:

Buku dengan judul *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942* (judul terjemahan). Karya yang ditulis oleh George D. Larson yang diterjemahkan oleh Dr. A. B. Lopian. Buku dicetak oleh Gadjah Madha University Press dan diterbitkan pada tahun 1990. Isi karya tersebut banyak disandarkan dari berbagai sumber yang diperoleh dari arsip Kerajaan Belanda di Den Haag dan beberapa tempat di Belanda. Selain itu, di Indonesia sumber arsip dihimpun dari Perpustakaan dan Arsip Reksopustoko dari Mangkunegaran, Museum Radya Pustaka, Sanapustaka dari Kasunanan Surakarta, Perpustakaan Nasional, dan lain-lain. Buku ini memberikan informasi mengenai kehidupan rumah tangga di dalam keraton menjelang kemerdekaan, baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Kondisi politik yang terjadi dijabarkan dengan munculnya berbagai kelompok dan gerakan politik di Surakarta, seperti Sarekat Islam dan Boedi Utomo pada awal tahun 1912. Di samping itu, pada rentang 1918-1927 muncul gerakan radikalisme

dan komunisme di Surakarta. Dijelaskan bahwa keadaan yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi dua kerajaan yang ada di Surakarta, baik secara politik maupun dalam bidang lainnya.

Persamaan buku ini dengan kajian peneliti adalah membahas tentang sejarah politik di Surakarta. George D. Larson memberikan informasi tentang tatanan masyarakat Jawa, khususnya dalam lingkup keraton dan politik keraton menjelang kemerdekaan. Hal tersebut membantu peneliti menganalisis tentang sistem pemerintahan keraton, termasuk Kepatihan Surakarta sebelum kemerdekaan Indonesia. Adapun perbedaan dengan kajian peneliti terletak pada fokus penelitian. Buku ini difokuskan pada keadaan Surakarta menjelang masa revolusi, yakni tahun 1912-1942, sedangkan kajian peneliti lebih berfokus pada berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta tahun 1945-1946.

Buku dengan judul *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Prespektif Historis, Sosiologi, Filosofis, & Yudiris* yang ditulis oleh Imam Samroni dkk.. Buku ini diterbitkan oleh Pura Pustakan Shaida pada tahun 2004. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai permasalahan seputar status Daerah Istimewa Surakarta serta hambatan yang ada. Buku ini menjelaskan tentang proses hilangnya status keistimewaan yang disandang Surakarta dan sikap serta usaha Kasunanan Surakarta untuk mengembalikan status keistimewaan tersebut. Selain itu, isi buku sebagian besar menjelaskan tentang alasan keistimewaan Surakarta yang dapat menjadi dasar atas dikukuhkannya Daerah Istimewa Surakarta. Persamaan buku ini dengan kajian peneliti adalah mengkaji daerah Surakarta,

khususnya pada masa pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta. Hal tersebut membantu peneliti dalam menganalisis keadaan sosial-politik pada masa itu. Akan tetapi, buku ini memiliki fokus kajian yang berbeda, yakni mengkaji Daerah Istimewa Surakarta. Selain itu, dalam buku ini mengkaji bukan hanya menggunakan perspektif historis, namun juga sosiologi, filosofis, dan yudiris.

Artikel ilmiah dengan judul “Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Kasunanan Surakarta”. Artikel tersebut ditulis oleh Muhammad Anggie Farizqi Prasadana dan Hendri Gunawan diterbitkan pada tahun 2019. Artikel ini memberikan informasi mengenai susunan birokrasi yang ada di Kasunanan Surakarta, baik tradisional maupun kolonial. Pada sistem birokrasi tradisional raja mempunyai kedudukan paling tinggi yang berperan sebagai kepala pemerintahan, panglima perang, dan pemimpin agama. Birokrasi kolonial mulai masuk di Kasunanan Surakarta, khususnya setelah Perang Jawa. Hal tersebut mengakibatkan perubahan pada struktur birokrasi. Kedudukan raja bukan lagi kedudukan tertinggi, tetapi setara dengan residen. Selain itu, patih memiliki dua peran, yakni bagian dari keraton dan Belanda. Birokrasi tradisional di Kasunanan Surakarta mengalami kesulitan setelah kemerdekaan Indonesia. Revolusi yang terjadi di wilayah Surakarta merupakan faktor utama, khususnya gerakan anti swaprja terhadap Kasunanan dan Mangkunegaran. Hal tersebut mengakibatkan runtuhnya birokrasi tradisional di Surakarta.

Persamaan dalam artikel ini dengan kajian peneliti adalah membahas tentang keruntuhan birokrasi atau lembaga yang ada di Kasunanan Surakarta. Hal tersebut membantu peneliti dalam menganalisis tentang struktur birokrasi

di Kepatihan Surakarta yang merupakan bagian dari Kasunanan Surakarta. Akan tetapi, di dalam artikel ini kurang menjelaskan tentang struktur birokrasi yang terjadi setelah kemerdekaan, khususnya ketika masa pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Adapun perbedaan artikel ini dengan kajian peneliti terletak pada fokus kajian yang diambil. Fokus kajian pada artikel ini birokrasi di Kasunanan Surakarta, sedangkan kajian peneliti berfokus pada Berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta.

Tugas Akhir, *Skripsi* dengan judul “Terbentuknya Birokrasi Modern di Surakarta Tahun 1945-1950”. Karya tersebut ditulis oleh Belda Ranika Rosiana mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret pada tahun 2012. Skripsi karya Belda Ranika berisi tentang perkembangan birokrasi di Surakarta. Birokrasi Tradisional yang sudah dianut selama ratusan tahun mulai diganti dengan dibentuknya birokrasi modern setelah masa kemerdekaan Indonesia. Ia menjabarkan dengan menjelaskan tentang birokrasi di Surakarta menjelang kemerdekaan Indonesia dengan dibagi menjadi tiga sub bab. Sub-sub tersebut adalah konsep mengenai birokrasi kolonial, tradisional (Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran), dan ketika pendudukan Jepang. Hal ini memberikan gambaran dan perbandingan untuk bagi terbentuknya birokrasi modern di Surakarta. Setelah kemerdekaan muncul berbagai peristiwa di Surakarta yang menyebabkan mulai terbentuknya birokrasi modern, khususnya setelah dibubarkannya pemerintahan swapraja. Terjadi beberapa kali perubahan pemerintahan karena adanya situasi sosial-politik yang terjadi antara tahun 1945-1950. Perubahan birokrasi dari

tradisional ke modern memberikan peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam bidang politik pemerintahan. Selain itu, pada masa itu banyak dibentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang membantu dalam kinerja pemerintah Surakarta.

Persamaan skripsi ini dengan kajian peneliti adalah membahas tentang birokrasi di Surakarta, khususnya birokrasi tradisional di lingkungan Kasunanan Surakarta. Hal tersebut membantu peneliti dalam menganalisis tentang struktur dan perkembangan birokrasi di Surakarta, khususnya birokrasi tradisional. Adapun perbedaan dengan kajian peneliti terletak pada fokus penelitian. Pada skripsi karya Belda membahas perkembangan birokrasi di Surakarta secara umum, sedangkan kajian peneliti berfokus pada berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta.

E. Landasan Teori

Aspek yang berkaitan dengan peristiwa berakhirnya Kepatihan Surakarta tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial-politik pada masa itu. Kontruksi sosial dan benturan antar kepentingan yang terbentuk merupakan bagian dari pergerakan situasi sosial yang terjadi khususnya setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pergerakan yang terjadi khususnya di daerah Surakarta yang mencakup dua kerajaan, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Pergerakan sosial-politik tersebut menghasilkan berbagai peristiwa, termasuk terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Pembentukan pemerintahan baru tersebut menyebabkan berubahnya sistem pemerintahan di internal Keraton Surakarta dan Kepatihan. Selain itu, terjadi

pemberontakan para pemuda dan penculikan sejumlah tokoh elit tradisional, sehingga menyebabkan ditingkatnya DIS sebagai daerah dengan status bahaya¹⁶ dan sekaligus dikembalikannya pemerintahan kepada pusat untuk sementara tahun 1946 serta resmi berakahir pada tahun 1950 dengan dibentuknya provinsi Jawa Tengah.

Guna mempermudah dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai alat bantu ilmu sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik. Secara umum kajian politik berokus pada segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁷ Menurut Delier Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Dari definisi tersebut, maka hakekat politik menunjukkan segala perbuatan manusia, baik berupa kegiatan, perilaku, maupun sikap yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mempertahankan tatanan suatu masyarakat atau kelompok dengan menggunakan sebuah kekuasaan.¹⁸

Di dalam konsep politik, kekuasaan adalah perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam mempengaruhi satu sama lain. Terdapat beberapa jenis kekuasaan dalam politik, tetapi menurut David Easton kekuasaan politik memiliki daya paksa yang sah kepada masyarakat umum. Di samping itu,

¹⁶Lihat UU No. 16 tahun 1946 tentang pernyataan keadaan bahaya di seluruh Indonesia.

¹⁷Deden Abdurrahman dan wawan Sobri, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 8.

¹⁸Abdul Kadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)", Vol. XXI, No. 2 2005, hlm. 265.

bentuk kekuasaan bertujuan untuk mempengaruhi segala aktivitas dan tindakan negara yang mencakup masyarakat.¹⁹

Situasi politik pada masa awal kemerdekaan hingga revolusi Indonesia mengakibatkan adanya dorongan untuk menjadi satu bangsa yang senasib dan terbebas dari kekuasaan penjajah asing. Akan tetapi, perilaku manusia yang menginginkan suatu kekuasaan atas kekuasaan lain menimbulkan sebuah gejala yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik antara satu dengan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu dengan tidak adanya kesepakatan bersama antar kekuasaan swapraja dan otoritas atau lembaga resmi pemerintah pusat di Surakarta, serta diperparah oleh keinginan kelompok perjuangan, khususnya golongan anti swapraja yang menginginkan penghapusan kekuasaan feodal. Hal tersebut menimbulkan peristiwa-peristiwa dan konflik sosial yang mempengaruhi susunan masyarakat di Surakarta.

Dalam mendukung penelitian juga digunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi berhubungan dengan tingkah laku dan hubungan suatu masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Secara sederhana, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hal yang berkaitan tentang hubungan antar manusia. Perilaku manusia dipengaruhi oleh kelompok masyarakat tempat dia terlibat dalam interaksi sosial.

¹⁹Deden Faturrahman dan Wawan Sobri, *Pengantar Ilmu Politik...*, hlm. 24-25.

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi digunakan untuk mengamati adanya gejala-gejala sosial dan interaksi antara kaum elit tradisional, nasionalis, dan masyarakat yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dan revolusi yang terjadi di Surakarta. Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta mengakibatkan terjadinya pergolakan yang dipengaruhi oleh situasi politik yang ada. Para kelompok perjuangan, khususnya kelompok yang tergabung ke dalam gerakan anti swapraja melakukan mobilisasi masa atau masyarakat Surakarta dalam penghapusan kekuasaan swapraja. Hal tersebut mengakibatkan perubahan struktur sosial masyarakat yang sebelumnya dipegang oleh kaum elit tradisional, yakni Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Teori yang berkembang dalam studi sosiologi politik dibagi menjadi lima bagian, yaitu perspektif fungsionalis struktural (*struktural-fungsionalis*), konflik, kelas, elites, dan pluralis.²⁰ Adapun dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori konflik. Konflik adalah suatu dinamika dalam masyarakat yang menganggap perubahan sosial dan ketidaksepakatan merupakan hal yang penting. Keberadaan konflik memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih mengerti tentang adanya perbedaan yang ada serta perubahan sosial yang terjadi semakin berkembang.

Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa sifat dasar manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri adalah penyebab yang menimbulkan konflik

²⁰Mochtar Mas'ood dan Nasikun, *Sosiologi Politik* (Yogyakarta: PAU-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1987), hlm. 2., Dikutip oleh Iing Nurfaain, *Sejarah Runtuhnya Orde Baru 1988-1998*, *Skripsi* Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

terjadi dalam masyarakat. Ralf Dahrendorf menekankan sumber konflik berasal karena adanya perbedaan kekuasaan antara mereka yang memiliki, tidak, dan kekurangan kekuasaan. Kekuasaan dianggap sebagai sumber daya yang terbatas, sehingga dapat menimbulkan adanya konflik sosial.²¹ Hal ini sesuai dengan pendapat Girard dalam teori *mimesis* yang menjelaskan bahwa konflik adalah bagian dari diri manusia. Setiap manusia memiliki hasrat yang ingin sama dengan yang lain, lebih unggul, dan menguasai atas manusia lain. dalam hal ini konflik tidak dimulai dari akal, tetapi dari keinginan manusia itu sendiri.²²

Perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu mengakibatkan adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik tersebut bukan hanya melibatkan para kaum elit, baik tradisional maupun nasionalis, tetapi berimbas kepada masyarakat umum. Teori ini digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa (konflik) yang terjadi serta mengakibatkan berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta pada tahun 1946.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah metode yang digunakan dalam digunakan dalam penelitian sejarah untuk mengungkapkan kejadian yang telah terjadi di masa lalu dengan lebih akurat. Metode penelitian sejarah dapat diartikan sebagai proses merangkai dan menganalisa secara kritis rekaman dan

²¹*Ibid.*, hlm. 15.

²²Ebin Eyzer Danius, "Epistemologi Konflik: Memahami Konflik Berdasarkan Teori Mimesis Rene Girard", *Hibualamo dalam Jurnal Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan*, Vol. 3, No. 1, 2019., hlm. 64-65.

peninggalan masa lalu.²³ Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian sejarah, yaitu:

1. Heuristik

Dalam penelitian sejarah, heuristik adalah tahapan pertama yang harus dilakukan oleh sejarawan. Heuristik adalah pengumpulan data atau sumber penelitian yang bersangkutan dengan judul atau topik yang diteliti. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan sumber primer dan skunder. Di samping itu, penelitian ini termasuk ke dalam jenis *Library Resaerch* (studi literatur). Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian didapatkan dari berbagai tempat, antara lain: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Grhatama Pustaka, dan Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Sasana Pustaka. Pencarian sumber juga dilakukan melalui sumber digital dengan mengakses website perpustakaan universitas atau lembaga, seperti website Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) BPK RI, Garuda Kemendikbud, dan SastraJawa.org..

Adapun beberapa arsip yang ditemukan dan digunakan, yaitu berupa perundang-undangan Indonesia, seperti UU No. 1 tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah, UU No. 16 tahun 1946 tentang pernyataan keadaan bahaya di seluruh Indonesia termasuk Surakarta,

²³Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 104.

UU No. 10 tahun 1950 tentang pembentukan provinsi Jawa Tengah. Selain itu, juga terdapat arsip tentang pendirian Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan No. 554/k/3-b yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 1950.

Adapun sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini, yakni berupa buku, artikel, dan tugas akhir. Buku yang digunakan antara lain *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta* yang ditulis oleh Dwi Ratna Nurhajarini, dkk.. Buku ini diterbitkan pada tahun 1999. Buku dengan judul *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis, dan Yudiris* yang ditulis oleh Imam Samroni dkk.. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010. Selain itu, artikel dengan judul “Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Kasunanan Surakarta” yang ditulis oleh Muhammad Anggie Farizqi Prasanada dan Hendri Gunawan. Di samping itu, tugas akhir yang ditulis oleh Belda Ranika Rosianan dengan judul “Terbentuknya Birokrasi Modern di Surakarta Tahun 1945-1950” dari Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Verifikasi

Setelah melakukan pengumpulan data atau heuristik, langkah selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber dilakukan untuk memperoleh keaslian dan keabsahan data atau sumber yang

digunakan dalam penelitian. Pada metode penelitian sejarah, kritik dibagi menjadi dua bagian, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern adalah mengkritisi sumber dari sisi fisik atau luar untuk mengetahui keaslian sumber. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperhatikan jenis kertas, tinta, gaya tulisan dan bahasa, dan lain sebagainya. Adapun pada kritik intern lebih menekankan pada isi dari sumber. salah satu yang dapat digunakan dalam kritik intern adalah membandingkan isi sumber satu dengan yang lain.

Penulisan menemukan perbedaan tentang patih yang menjabat di Kepatihan Kasunanan Surakarta. Pada artikel yang dipublikasikan pada website <https://www.jangkara.com/pendidikan/65913899547/sejarah-lengkap-daftar-patih-dalem-kraton-surakarta-peran-penting-dalam-pemerintahan-jawa?page=2>., setelah Patih Sasradiningrat IV tidak disebutkan Patih Jayanegara dan langsung berlanjut pada Patih Sasradiningrat V. Pengangkatan dan penetapan Patih Jayanegara tercatat pada *Serat Tetapan Papatih Dalem Kanjeng Raden Adipati Jayaneagara* yang tersimpan dalam koleksi Perpustakaan Sasana Pustaka dengan nomor KS 160 25 Ca. Pada serat tersebut disebutkan bahwa Wakil Menteri Jayanegara ditetapkan menjadi *Nindya Menteri* pada hari minggu, 14 Besar 1847. Upacara pengangkatan Wakil Menteri Jayanegara dilaksanakan pada hari senin, 14 Bulan Besar 1847. Wakil Menteri Jayanegara ditetapkan menjadi Patih di Nagari Surakarta seperti

yang tercantum dalam surat keputusan tertanggal 9 Agustus 1917 No. 10.

Pada Sripkri yang ditulis oleh Devi Arianti dengan judul “Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja di Surakarta Tahun 1945-1946” pada halaman 93 menyebutkan bahwa korban pertama yang diculik adalah *Pepatih Dalem K.R.M.H Sasradiningrat IV*. Hal tersebut tidak selaras dengan keterangan yang dalam buku *Serat Dhiri Laksita* yang berisi tentang biografi Patih Sasradiningrat IV. Pada halaman 270 yang menyebutkan bahwa Patih Sasradiningrat IV meninggal pada hari Minggu Legi, tanggal 6 Besar tahun Dal 1855 tepatnya pada tanggal 28 Juni 1925. Ia meninggal dikarenakan sakit panas serta batuk selama 4 hari. Patih Sasradiningrat IV dimakamkan pada hari Selasa Pon tanggal 8 Besar 1855 di Imogiri.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah langkah yang dilakukan sejarawan dalam menafsirkan data atau sumber. fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat dikonstruksikan dengan baik. Cara yang digunakan dalam menginterpretasikan adalah menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan data dalam urutan kausal.

Interpretasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni analisis dan sintesis. Penelitian ini menggabungkan dua cara tersebut dengan menggunakan sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan dikritik

serta menggabungkannya. Sumber yang telah didapat dicermati konsep-konsepnya terlebih dahulu. Setelah itu, konsep-konsep diurai dan dicari bagian mana yang cocok dengan penelitian. Selanjutnya menggabungkan data yang mempunyai konsep sama. Konsep tersebut adalah hasil dari pengayaan dari peneliti setelah membaca berbagai peristiwa.

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan.²⁴ Dalam penulisan sejarah, memperhatikan aspek kronologis sangat penting. Pada penulisan harus dilakukan secara sistematis dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, sehingga tulisan dapat dengan mudah dipahami.²⁵ Peneliti berupaya menyajikan karya sejarah yang disusun secara dengan memulai dari sejarah kepatihan, kemudian dilanjutkan dengan kepatihan memasuki tahun 1945 hingga runtuhnya pada tahun 1946. Di samping itu, peneliti menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan unruk

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah dalam memahami pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti membagi menjadi lima bab. Bab I merupakan pendahuluan

²⁴Dudung Abudurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam...*, hlm. 17.

²⁵Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 80.

yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Uraian dalam pendahuluan merupakan dasar atau landasan pemikiran untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas tentang sejarah Kepatihan Kasunanan Surakarta. Pada bab ini dijelaskan sejarah awal pembentukan Kepatihan Kasunanan Surakarta. Sub babasan kedua membahas tentang masa emas di Kepatihan Kasunanan Surakarta.

Bab III membahas tentang Kepatihan Surakarta setelah masa kemerdekaan Indonesia. Sub bab pertama menjelaskan perubahan politik dan status Kasunanan Surakarta setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Setelah itu pembahasan dilanjutkan dengan perubahan fungsi dan peran Kepatihan Kasunanan Surakarta dalam sistem pemerintahan Kasunanan setelah terbentuknya DIS. Bab IV membahas tentang keruntuhan di Kepatihan Surakarta yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan peristiwa. Adapun bab ini menjadi pengantar menuju ke bab akhir. Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Sementara itu, saran dimaksudkan untuk memberi masukan pada penelitian selanjutnya, baik praktis maupun teoritis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepatihan sebagai bagian dari sistem pemerintahan Keraton Kasunanan Surakarta menyimpan banyak peristiwa sejarah. Peristiwa *Palihan Nagari* yang membagi Kerajaan Mataram menjadi titik awal pembentukan lembaga Kepatihan di bawah Keraton Kasunan Surakarta. Sistem birokrasi yang ada di kepatihan menganut pada birokrasi tradisional yang menempatkan raja sebagai puncak pemerintahan. Adapun dalam pemerintahan kerajaan, kepatihan berfungsi sebagai lembaga pusat administrasi kerajaan dan patih sebagai wakil dari raja. Adapun dalam menjalankan roda pemerintahan di kepatihan dibantu oleh para Bupati *Nayaka* dan Bupati *Pangreh Praja* dan para *abdi dalem* di struktur bawah. Seiring berjalannya waktu pengaruh kolonial menjadikan patih bukan hanya sebagai wakil dari raja, tetapi juga merangkap sebagai pegawai pemerintah kolonial. Kepatihan Kasunanan Surakarta mencapai masa keemasan sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20 dengan patih yang terkenal yaitu, Patih Sasradiningrat IV.

Memasuki tahun 1945 dan transisi pemerintahan dengan bergabungnya Kasunanan Surakarta dengan Negara Republik Indonesia menyebabkan adanya perubahan di kepatihan. Surakarta dijadikan menjadi daerah istimewa dengan mengabungkan Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Setelah terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta, kepatihan tidak lagi menjadi lembaga yang independen, tetapi tetap diakui dan memegang administrasi

internal kerajaan. Pengolahan wilayah dan regulasi administrasi seperti pajak mulai diambil alih oleh otoritas pemerintah Republik Indonesia.

Setelah kemerdekaan, terjadi revolusi sosial di Indonesia sebagai imbas dari transisi perubahan kekuasaan dari kolonial menjadi bangsa yang mandiri. Surakarta tidak terlepas dari peristiwa revolusi tersebut. Daerah Istimewa Surakarta yang dipimpin oleh swapraja menimbulkan adanya pro dan kontra sehingga menimbulkan tuntutan penghapusan swapraja. Tuntutan yang terus dilakukan melemahkan pemerintahan swapraja dan jajarannya. Kelompok anti swapraja ekstrim melakukan penerobosan dan penculikan elit keraton termasuk lembaga kepatihan. Kerusuhan yang terjadi menyebabkan diumumkannya keadaan bahaya di Surakarta. Pada tanggal 15 Juli 1946, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 16/SD/1946 yang menjadi pembekuan pemerintahan swapraja di Surakarta sekaligus akhir dari Kepatihan Kasunanan Surakarta.

B. Saran

Kajian ilmiah mengenai Kepatihan Kasunanan Surakarta masih sangat perlu diteliti lebih lanjut, khususnya pada masa transisi setelah kemerdekaan antara tahun 1945-1950. Terdapat masih banyak pembahasan mengenai Kepatihan Kasunanan Surakarta yang belum mendapat perhatian serta keberadaan sumber-sumber primer yang tersedia. Kepatihan Kasunanan Surakarta menyimpan banyak sejarah yang belum terkuak dan perlu adanya perhatian lebih lanjut karena Kepatihan merupakan pusat administrasi dari Kasunanan

Surakarta. Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat mengkaji tentang sejarah terkait Kepatihan sehingga dapat menarik kajian-kajian berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Website JDHIN. *Inventaris Undang-Undang*. Jakarta: JDIH Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN. 1945.
- ____. *Inventaris Undang-Undang*. Jakarta. JDIH Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN. 1946.
- ____. *Inventaris Undang-Undang*. Jakarta: JDIH Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN. 1950.
- Surat Keputusan Menteri No. 554/K/3-b tentang pendirian Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta.

Buku

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Daliman, A.. 2012. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indnesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Deden Faturrahman dan Wacana Sobri. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UMM Press.
- Dwi Ratna Nurhajarini, dkk.. 1999. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya.
- Ibrahim, Julianto. 2004. *Bnadit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Reolusi di Surakarta*. Surakarta: Bina Citra Pustaka.
- Imam Samroni, dkk.. 2010. *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Prespektif Historis, Sosiologis, Filososfis, dan Yudiris*. Yogyakarta: Pura Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Larson, George. 1990. *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, A.H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan*. Jilid. 3. Bandung: Angkasa.
- Ricklef, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu.
- Soeratman, Darsiti. 1989. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Taman Siswa Press.

Woerjaningrat. 1970. *Sekedar Uraian Tentang Swapraja Pada Masa Proklamasi*. Tidak diterbitkan.

Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islamiyah II*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Artikel

Abdulkadir B. Nabo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa. “Memahami Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari sistem Politik)”. *Mimbar*, Volume XXI, No. 2 April-Juni 2005, hlm. 262-285.

Ebin Eyzer Danius. “Epistemologi Konflik: Memahami Konflik Berdasarkan Teori Mimesis Rene Girard”. *Hibualamo: Jurnal Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan*, olume 3, No. 1 2009, hlm. 60-65.

Hapsari, Kris. “Kasunanan dan Mangkuneagran di Tengan Pendudukan Jepang”. *Indonesia Historical Studies*, Vol. 2, No. 1. 2018, hlm. 36-45.

Huda, Ni'matul. “Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Perspektif Historis dan Yudiris”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 20, No. 3 Juli 2013, hlm. 402-422.

Muhammad Anggie Farizqi Prasanada dan Hendri Gunawan, “Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Kasunanan Surakarta”. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, Volume 2, No. 2 Juni 2019, hlm. 187-200.

Soejatno. “Revolution and Social Tension in Surakarta”, Translated by Benedict Anderson. *Indonesian: Cornel University Press*, No. 17, 1974. Hlm. 99-111.

Tugas Akhir

Ariyanti, Devi. 2013. “Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja di Surakarta Tahun 1945-1946”, *Skripsi* pada Fakultas Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Kurniawan, Redwan. 2023. “Dari Ulama Hingga Pejuang: Peranan KH. Ma'ruf Mangunwiyoto Pada Masa Revolusi Fisik di Surakarta 1945-1946”, *Skripsi* pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nuranto, Irsyad Iko. 2010. “Sejarah Manajemen Museum Radya Pustaka Tahun 1926-2008”, *Skripsi* pada Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nurfaain, Iing. 2010. “Sejarah Runtuhnya Orde Baru 1989-1998”, *Skripsi* pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rusli M. Said dan Junaib Umar. "Analisis Sosiologis Fenomena Historis Revolusi Sosial Pada Periode Kemerdekaan Indonesia". hlm. 48-63.

Rosiana, Belda Ranika. 2013. "Terbentuknya Birokrasi Modern di Surakarta Tahun 1945-1950", *Skripsi* pada Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sandya, Yaser Pratama. 2022. "Bertahan di Tengah Konflik: Revolusi Sosial di Praja Mangkunegaran Tahun 1945-1946", *Skripsi* pada Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Internet

Aunur Rofiq. "Patih Sasranagara dan Regulasi Agraria: Mengawal Tanah dan Pedesaan Surakarta Abad ke-19". *JatimTimes*. 20 Maret 2025. <https://jatimtimes.com/baca/333764/20250320/114200/patih-sasranegara-dan-regulasi-agraria-mengawal-tanah-dan-pedesaan-surakarta-abad-ke-19>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025 pukul 14:57 WIB.

Purwandi. "Patih Sosrodiningrat Ahli Tata Negara", *Liputan68.com*., 27 Juni 2021. <https://www.liputan68.com/2021/06/27/patih-sosrodiningrat-ahli-tata-negara/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 04:27 WIB.

"Ketidakjelasan Hancurnya Kompleks Kantor Kepatihan, Memunculkan Banyak spekulasi", *IMNews*., 16 April 2021, <https://imnews.id/2021/04/16/ketidakjelasan-hancurnya-kompleks-kantor-kepatihan-memunculkan-banyak-spekulasi/>., diakses pada tanggal 24 Juli 2025 pukul 05.12 WIB.

"Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta", *Kratonjoogja.id*., 02 April 2018. <https://www.kratonjogja.id/ragam/8-pepatih-dalem-kesultanan-yogyakarta/>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2025, pukul 12:13 WIB.

"Profil Museum Radya Pustaka", *UPTMuseum*. 08 Desember 2018. <https://uptmuseum.surakarta.go.id/?p=ms&id=20v>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 14:37 WIB.

<https://smknegeri8surakarta.sch.id/sejarah-sekolah/>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2025.